

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan terlebih dalam berbangsa dan bernegara kita tidak akan pernah bisa terlepas dari istilah birokrasi. Hal itu dikarenakan adanya birokrasi sudah menjadi suatu hal yang pasti yang dimana kehadirannya menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan juga sulit untuk dihindari. Tidak bisa dipungkiri semenjak terlahir ke dunia bahkan sampai saat meninggal dunia pun kita sebagai manusia yang hidup dalam keadaan bermasyarakat harus selalu berhadapan serta berhubungan dengan instansi pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan birokrasi. Bukan tanpa sebab hal itu terjadi melainkan karena memang sejatinya birokrasi senantiasa ada di dalam setiap lini kehidupan tanpa terkecuali.

Di era kehidupan yang modern saat ini birokrasi semakin memiliki peran yang sangat vital serta mempunyai posisi yang teramat penting di dalam kehidupan masyarakat. Birokrasi menjadi institusi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan lebih dari itu proses kehidupan masyarakat sendiri dapat dikatakan tidak akan mungkin bisa berlangsung ataupun tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya peran dari birokrasi sebagai penghubung antara Negara dan masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut Hegel dalam (Setiawan, 2014) menyebutkan bahwasanya birokrasi sebagai *mediating agent* yaitu penjemabatan antara

kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat dan juga sebagai penghubung antara Negara atau *civil society* yang merepresentasikan khusus kepentingan yang ada didalam masyarakat.

Berbicara terkait birokrasi sendiri tentu hal itu tidak terlepas dari teori-teori yang telah dicetuskan oleh para ahli. Dimana hasil pemikiran-pemikiran tentang birokrasi yang sebelumnya telah digagas dan kemudian dijadikan sebagai rujukan atau dipakai sebagai dasar pedoman didalam pelaksanaan birokrasi pemerintah. Salah satu pencetus birokrasi yang dimana gagasannya telah memberikan pengaruh serta kontribusi yang sangat besar atas keberlangsungan birokrasi di pemerintahan yakni adalah Max Weber. Pemikiran serta gagasan birokrasinya menjadi yang paling banyak digunakan dan diterapkan diberbagai Negara termasuk dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Max Weber dalam (Toha, 2016) menawarkan beberapa hal yang kemudian menjadi konsep ideal dari birokrasinya yang rasional yakni pertama individu pejabat secara personal bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya, kedua jabatan-jabatan itu tersusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan kesamping, ketiga tugas serta fungsi dari masing-masing jabatan di dalam hierarki tersebut secara spesifik berbeda satu sama lain, keempat setiap pejabat memiliki kontrak jabatan yang harus dijalankan, kelima setiap pejabat di seleksi atas dasar kualifikasi profesionalitas nya, keenam setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiunan sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya, ke tujuh terdapat struktur pengembangan karir yang jelas, ke delapan setiap pejabat menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi ataupun

keluarga, dan kesembilan setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan juga pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Lebih lanjut Max Weber menjelaskan bahwasanya tipe ideal mampu digunakan untuk membandingkan antara birokrasi yang terdapat pada organisasi yang satu dengan birokrasi yang ada pada organisasi lainnya yang mana jika suatu birokrasi tersebut tidak mampu berfungsi di dalam tipe ideal dari organisasi tertentu maka akan dapat ditarik suatu penjelasan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Selain itu dapat diketahui faktor apa saja yang membedakannya. Tipe ideal birokrasi tersebut dapat untuk menjelaskan bahwasanya suatu birokrasi memiliki suatu bentuk yang pasti yang dimana dengan hal itu semua fungsi dijalankan serta dilaksanakan dalam cara-cara yang rasional.

Konsep Max Weber memaparkan bagaimana birokrasi dapat berjalan dengan ideal melalui organ-organ dan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meraih peringkat B penghargaan prestasi akuntabilitas kerja pada tahun 2018. Penghargaan tersebut diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya baru pertama kali mendapatkan penghargaan Prestasi Tinggi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat pada 19 Agustus 2016.

Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat, memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah, khususnya Bagian Tata Pemerintahan, merupakan unit

penting dalam mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, dan hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana aktualisasi prinsip-prinsip birokrasi Max Weber telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip birokrasi ideal Max Weber diaktualisasikan dalam praktik keseharian birokrasi di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran empiris mengenai efektivitas struktur dan proses birokrasi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, rasional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berangkat dari hal tersebut maka penulis bermaksud untuk melakukan pengkajian mengenai Aktualisasi Birokrasi Menurut Max Weber di bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya apakah sudah sesuai dan sejalan dengan apa yang digagaskan oleh Max Weber dan atau malah justru sebaliknya. Dalam proses pengkajiannya birokrasi Max Weber menjadi teori yang penulis gunakan sebagai pisau dalam melakukan analisisnya yang mana teori birokrasi weber menjadi konsep ataupun tipe ideal dari birokrasi yang rasional di dalam pemerintahan. Dengan hal tersebut maka penulis menyuguhkan penelitian terkait hal tersebut dengan judul “ Aktualisasi Birokrasi Max Weber (Studi Kasus bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya)“.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Bagaimana Aktualisasi Birokrasi Max Weber (Studi Kasus bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menginterpretasikan Aktualisasi Birokrasi Max Weber (Studi Kasus bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya).

1.4 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan supaya tidak terlalu luas atau melebar dari apa yang ingin di teliti oleh penulis, maka penelitian ini dibatasi pada aktualisasi birokrasi yang digagas oleh Max Weber dalam hal ini yaitu terkait dengan konsep ideal birokasinya yang ada di bagian tata pemerintaham Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan serta pemahaman umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi penulis mengenai birokrasi pada

pemerintahan terutama terkait dengan Aktualisasi Birokrasi Max Weber (Studi Kasus bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya).

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa dipakai atau dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya terutama terkait dengan Aktualisasi Birokrasi Max Weber pada lembaga pemerintahan khususnya lembaga pemerintah daerah.